

LAPORAN KEGIATAN LAUNCHING WHITE PAPER AGENDA FOR GREEN ECONOMY IN INDONESIA



BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN





**LAPORAN KEGIATAN
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) DPR RI**

**LAUNCHING WHITE PAPER
*AGENDA FOR GREEN ECONOMY IN INDONESIA***

Gianyar - Bali, 11 - 13 Januari 2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbincangan global terkait ekonomi hijau semakin mengemuka seiring dengan meluasnya dampak perubahan iklim. Dalam berbagai laporan empiris, dampak turunan perubahan iklim semakin nyata mulai dari naiknya permukaan air laut, pemanasan global, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Lebih dari itu, perubahan iklim juga mengancam eksistensi kehidupan manusia karena bisa mendorong krisis pangan, air, energi dan lain sebagainya.

Baru-baru ini, pemanasan global akibat perubahan iklim rata-rata telah mencapai angka 1,1°C atau hanya beberapa poin dari kesepakatan global seperti Paris Agreement yang berupaya menahan laju pemanasan maksimal pada angka 1,5°C di akhir abad ini. Pada pertemuan PBB untuk perubahan iklim atau COP ke-16 di Glasgow Skotlandia akhir tahun lalu, para pemimpin dunia kembali menyerukan perlunya aksi bersama dan komitmen yang lebih kuat untuk menahan laju pemanasan global dan menangani dampak perubahan iklim.

Karena itu, perubahan pola produksi dan konsumsi manusia menjadi konsen berbagai kalangan mulai dari akademisi, aktivis lingkungan, hingga para pemimpin global. Dalam situasi ini, isu ekonomi hijau mendapatkan perhatian luas. Banyak negara terutama di Eropa Barat dan Skandinavia telah melakukan upaya transformasi dari mode ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata ke pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan atau *green economy*.

Sebagai negara yang sangat terdampak perubahan iklim, Indonesia juga menaruh perhatian besar terhadap isu transformasi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah RI telah meratifikasi target-target global dalam SDGs dan Paris Agreement. Selanjutnya, berbagai inisiatif kebijakan telah diluncurkan oleh pemerintah mulai dari dorongan untuk penggunaan energi terbarukan, pajak karbon, pembangunan industri berbasis energi listrik *hydro-power* dan lain sebagainya.

Namun demikian, agenda transformasi menuju ekonomi hijau membutuhkan dukungan kelembagaan, penganggaran, dan tata kelola yang baik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai lembaga representasi memiliki peran penting dalam mensukseskan berbagai kebijakan pemerintah. Sejalan dengan Pemerintah RI, DPR juga mempunyai konsen yang sama untuk mulai mendorong ekonomi hijau.

Sebagai bagian dari komitmen itu, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mempunyai inisiatif untuk menyusun suatu *White Paper* mengenai kerangka kebijakan ekonomi hijau di Indonesia. *White Paper* ini secara lengkap berjudul "*Agenda for Green Economy in Indonesia: Policy Initiative, Citizen Assembly, and International Cooperation*". Dokumen *White Paper* ini diharapkan mampu menjadi referensi besar bagi DPR RI dan Pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan dan instrumen kebijakan untuk mewujudkan transformasi ekonomi hijau.

Dokumen ini merupakan laporan pelaksanaan peluncuran *White Paper* yang diselenggarakan di Ubud, Kabupaten Gianyar - Bali, 12 Januari 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Acara peluncuran *White Paper* Ekonomi Hijau ini mempunyai maksud untuk:

- 1) Melakukan diseminasi hasil kajian tentang agenda ekonomi hijau di Indonesia;
- 2) Menguraikan agenda prioritas dalam pelaksanaan ekonomi hijau;
- 3) Mendapatkan masukan terutama dari para Anggota DPR terkait peta jalan ekonomi hijau di Indonesia;
- 4) Menyerahkan secara resmi Buku Putih Ekonomi Hijau dari Ketua BKSAP ke Pimpinan DPR RI;
- 5) Memberikan masukan substantif terhadap DPR RI sebagai referensi dalam menyusun kebijakan ekonomi hijau;

Sedangkan tujuan dari adanya Buku Putih Ekonomi Hijau ini adalah:

- 1) Memperkuat dan mempertajam kebijakan Pemerintah RI terkait ekonomi hijau;

- 2) Memberikan rekomendasi terkait aspek pengelolaan (governance) ekonomi hijau yang mencakup aspek kelembagaan dan kewenangan;
- 3) Mendorong keterlibatan lebih aktif dari warganegara sehingga mempunyai engagement lebih kuat terhadap agenda ekonomi hijau salahsatunya dengan pembentukan citizen assembly.

C. Peserta

Peluncuran Buku Putih Ekonomi Hijau ini dihadiri oleh Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI, Akademisi, dan NGO serta perwakilan Pemda Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut:

1. H. Lodewijk F. Paulus, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan/ Korpolkam; (Hadir secara virtual)
2. Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII yang membidangi energi, riset dan inovasi industri; (Hadir secara virtual)
3. Amalia Adininggar Widyasanti, Deputy Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (Hadir secara virtual)
4. Ir. Laksmi Dhewanti, MA, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); (Hadir secara virtual)
5. Rafael Jimenez-Aybar, Westminster Foundation for Democracy (WfD); (Hadir secara virtual);
6. Matthew Hedges, Asia and the Americas Regional Director of Westminster Foundation for Democracy (WfD); (Hadir secara virtual)
7. Dr. I Ketut Putra Erawan, MA, Executive Director of Institute for Peace and Democracy (IPD);
8. Tjok Bagus Pemayun, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan acara dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi pembukaan dan sesi inti. Acara pembukaan diawali dengan sambutan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yaitu Dr. Fadli Zon, Direktur Westminster WfD untuk Wilayah Asia dan Amerika, serta kemudian Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan yaitu Lodewijk F. Paulus.



Pembukaan acara *Launching White Paper Agenda For Green Economy in Indonesia*

A. PEMBUKAAN

1. Sambutan Ketua BKSAP DPR RI

Dr. Fadli Zon pertama-tama menyampaikan bahwa DPR dewasa ini tidak sekedar menjalankan fungsi representasi tapi kini lebih jauh mengemban mandat mendukung kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah. DPR memainkan peran diplomasi (parliamentary diplomacy) dalam kerangka menjaga dan mewujudkan kepentingan. Kemudian Dr. Fadli Zon menyampaikan beberapa contoh keterlibatan BKSAP dalam menyuarakan urgensi penanganan iklim dan pembangunan hijau di beberapa forum dunia seperti: Inter-Parliamentary Union (IPU), Pre-COP26 dan COP26 di Roma dan Glasgow, Asian Parliamentary Assembly (APA), Asian Pacific Parliament Forum (APPF), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan Parliamentary of OIC Countries (PUIC) serta forum-forum lainnya.

Lebih lanjut, Ketua BKSAP menyampaikan komitmen DPR RI dalam meng-adress berbagai tantangan global tanpa kecuali gagasan ekonomi hijau. DPR RI telah menginisiasi penyelenggaraan World Parliamentary Forum for Sustainable Development (WPFSD) sejak tahun 2017 sampai 2019. Di era pandemi, BKSAP secara virtual berkolaborasi dengan Inter

Parliamentary Union (IPU) menghelat The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs pada tanggal 28-30 September 2021. Saat ini, BKSAP DPR RI juga tengah menyiapkan diri sebagai tuan rumah Sidang Umum IPU ke-144 pada 20-24 Maret 2022 dengan mengambil tema "*Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change.*" Selanjutnya, Dr Fadli Zon menyoroti kesadaran kolektif dan literasi terkait perubahan iklim dan turunannya seperti gagasan ekonomi hijau masih dinilai rendah. Hasil survei YouGov, sebuah lembaga global untuk analisa data dan opini publik, yang dirilis pada Desember 2020 lalu, Indonesia termasuk salah satu negara dengan penyangkal perubahan iklim tertinggi. Survei itu menunjukkan sekitar 21% orang Indonesia mengatakan bahwa perubahan iklim itu tidak nyata atau bahwa manusia tidak bertanggung jawab atas perubahan iklim.

Peluncuran Green Economy White Paper ini merupakan ikhtiar BKSAP untuk mengeksplorasi, mengelaborasi dan menetapkan sudut pandang parlemen terkait gagasan ekonomi hijau.

Secara sistematis, agenda pada pagi dan siang hari ini difokuskan dalam kerangka: (1) menyelaraskan kembali kebijakan ekonomi hijau Indonesia; (2) mengarahkan tata kelola kebijakan ekonomi hijau Indonesia; (3) mengembangkan strategi untuk memanfaatkan potensi ekonomi hijau; (4) melembagakan kemitraan multistakeholder dan pertemuan warga (*citizen assembly*) dalam pembuatan kebijakan ekonomi hijau; (5) mengidentifikasi peluang untuk memperkuat sistem pendukung implementasi kebijakan ekonomi hijau Indonesia.

Namun demikian, implementasi ekonomi hijau masih dihadapkan pada beberapa tantangan seperti: 1) waktu dan biaya yang mahal serta membutuhkan kewaspadaan dan upaya yang konstan, 2) biaya barang bisa sangat tinggi karena mendirikan industri hijau baru dengan dukungan teknologinya akan memerlukan biaya tinggi, 3) kurang memadainya perangkat kebijakan di level nasional dan daerah yang memberikan dukungan penuh bagi realisasi ekonomi hijau. Beberapa hambatan di atas dan tentu saja hambatan-hambatan lain bisa diatasi jika semua pemangku kepentingan memiliki kemauan kuat (*strong political will*) dalam mewujudkan ekonomi hijau.

Terakhir, Dr Fadli Zon menegaskan bahwa ekonomi hijau bukanlah pilihan, tapi kebutuhan untuk menjamin eksistensi manusia dan keberlangsungan Planet Bumi. Ekonomi hijau diyakini dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kualitas tanah, air, dan udara. Pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, penggundulan hutan, penggurunan, penipisan sumber daya secara bertahap dapat diminimalisir dengan menerapkan ekonomi hijau.



2. Direktur WFD untuk Asia dan Amerika, Mathews Hedges

WFD merasa bangga bisa menjadi partner DPR RI dalam upaya memetakan agenda untuk *green economy* Indonesia. Salahsatu isu yang menjadi pokok diskusi WFD dengan Parlemen Indonesia pertama kali pada September 2020 bersama Ketua BKSAP untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan ekonomi hijau. Pada saat itu juga dibahas mengenai peran parlemen dalam pertumbuhan hijau pasca Covid-19. Pertemuan-pertemuan di Bali 2021 menghasilkan Rencana Aksi yang mendorong peningkatan peran diplomasi parlemen tentang perubahan iklim melalui keterlibatan di forum-forum internasional perubahan iklim seperti COP26 tahun 2021.

WFD juga saat ini sedang memulai implementasi program demokrasi lingkungan atau (*environmental democracy*). Program ini didukung oleh Pemerintah UK melalui UK PACT program. Program ini juga didesain untuk membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan upaya-upaya terhadap komitmen penanganan lingkungan dan juga mengarusutamakan ekonomi hijau dalam proses-proses di parlemen melalui forum multistakeholders, training, workshop yang menargetkan para anggota parlemen dan staf parlemen.

WFD memahami bahwa Indonesia memasang target yang sangat ambisius terutama target *net-zero carbon* pada tahun 2060. Dalam konteks ini, adanya White Paper *green economy* sangat krusial bagi kesuksesan pemerintah dalam mencapai target-targetnya. Buku putih ini penting terutama untuk: 1) Mereview dan meningkatkan kebijakan dalam hal energi dan penggunaan lahan; 2) Mereview struktur institusional yang mendukung terhadap agenda *green economy* termasuk koordinasi lintas sektor; 3) Meneruskan berbagai agenda pembangunan berkelanjutan termasuk *green economy*.

Kesuksesan agenda *green economy* tentu membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk parlemen dan warga negara. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk *engagement* warga negara terhadap agenda ini. Parlemen dapat meningkatkan legitimasi agenda ekonomi hijau melalui berbagai proses demokrasi deliberative yang melibatkan warganegara misalnya melalui *citizen assembly*. Pada saat yang sama, parlemen juga perlu meningkatkan fungsi pengawasannya agar pemerintah tetap berada *track* yang benar dalam mencapai target-target ekonomi hijau.

Di samping itu, kolaborasi tingkat internasional juga sangat diperlukan agar bisa berbagi pengalaman dalam menjalankan agenda *green economy*. Melalui UK Pact program, WFD juga sangat berkomitmen untuk mendorong berbagai upaya Indonesia untuk ekonomi hijau ini.

3. Sambutan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam

Setelah sambutan pengantar disampaikan oleh H. Lodewijk F. Paulus selaku Wakil Ketua DPR RI. Dalam pemaparannya, beliau pertama-tama menyoroti dasar empiris besarnya risiko perubahan iklim dan pemanasan global bagi negara Indonesia yang rawan bencana. Selain itu, seiring dengan dampak perubahan iklim maka ancaman kelangkaan pangan, krisis energi, kekurangan air bersih, dan kerusakan lingkungan semakin nyata.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR juga menegaskan kembali dukungan dan komitmen DPR RI terhadap agenda ekonomi hijau. Sebagai paru-paru dunia yang memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia tentunya memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang terdepan dalam penerapan ekonomi hijau.

DPR dan Pemerintah telah berupaya mengejawantahkan gagasan ekonomi hijau ke berbagai instrumen kebijakan. Beberapa aturan yang telah disepakati dan ditetapkan antara lain menyangkut skema peta jalan karbon melalui skema perdagangan karbon (*cap and trade*) dan skema pajak karbon (*cap and tax*) untuk menekan emisi salah satunya melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) yang memuat beberapa

poin tentang pajak karbon. Presiden menandatangani Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen implementasi kebijakan. Selain terkait skema penjualan karbon, pemerintah dan DPR RI juga sedang mendesain beberapa langkah enabling untuk menciptakan ekosistem yang supportive untuk mewujudkan net zero-carbon seperti melalui Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).

Dari sisi diplomasi, DPR RI juga mengapresiasi BKSAP yang konsisten melakukan diplomasi terkait perubahan iklim dan ekonomi hijau di berbagai forum baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. DPR RI telah berupaya memenuhi target-target dalam Paris Agreement, target SDGs, serta menjadi mitra P4G atau Partnership for Green Growth and Global Goals 2030, suatu jaringan kemitraan global untuk akselerasi pembangunan hijau.

Di tengah paparannya, Wakil Ketua DPR RI juga menyoroti beberapa tantangan pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

Pertama berkaitan dengan aspek kebijakan. Dibutuhkan political will dan inovasi kebijakan yang diterjemahkan ke dalam berbagai instrumen kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, juga membutuhkan dukungan berupa transfer teknologi untuk mempercepat proses transformasi.

Kedua, kunci sukses transformasi juga membutuhkan dukungan kelembagaan yang solid. Aspek kelembagaan berkaitan dengan governance atau mekanisme tata kelola termasuk pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antarpihak sehingga terbangun sinergitas dan sinkronisasi.

Ketiga, transformasi ekonomi hijau juga membutuhkan investasi yang sangat besar. Pemerintah telah mengkalkulasi dalam Second Biennial Update Report (BUR) 2018 untuk UNFCCC bahwa kebutuhan pendanaan untuk pengendalian iklim mencapai Rp 3.461 triliun hingga 2030. Sementara itu, kemampuan APBN untuk pendanaan perubahan iklim hanya mencapai rata-rata 4,1%. Karena itu, agenda perubahan iklim membutuhkan kontribusi banyak pihak termasuk pihak swasta dan dunia internasional.



Penyerahan Buku *White Paper - Agenda for Green Economy in Indonesia* dari Pimpinan BKSAP Dr. Fadli Zon, Putu Supadma Rudana dan Achmad Hafisz Tohir kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam H. Lodewijk F. Paulus

B. OVERVIEW WHITE PAPER GREEN ECONOMY (EXECUTIVE DIRECTOR OF IPD, Dr. I KETUT PUTRA ERAWAN)

Ada banyak pemaknaan terhadap ekonomi hijau yang kemudian menentukan arah kebijakan suatu negara. Berdasarkan kajian Tim White Paper Green Economy, terdapat setidaknya empat paradigma dalam memahami ekonomi hijau. *Pertama* green economy sebagai Green Resilience, yaitu suatu agenda ekonomi hijau yang didasarkan pada adaptasi terhadap krisis terutama yang ditimbulkan alam. Agenda ini diarahkan untuk memperkuat model ekonomi yang sejalan dengan upaya pencegahan bencana ekologi. Contoh negara yang menganut model ini adalah Ethiopia dan Malawi.

Kedua, pemaknaan green economy sebagai green growth. Pandangan ini datang dari perspektif ekonomi neo-klasik yang fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sambil secara perlahan-lahan melakukan upaya pengendalian iklim secara bersamaan. Agenda ini bisa dilihat dari berbagai instrumen kebijakan seperti pajak dan penjualan karbon (*carbon tax and carbon trading*). Model ini bisa dilihat dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah China dan India.

Ketiga, green economy juga dikonseptualisasikan oleh beberapa pihak sebagai green transformation. Artinya, pembangunan ekonomi hijau menitikberatkan pada transformasi yang lebih komprehensif yang mengandalkan dukungan teknologi, market, dan campur tangan negara dalam bentuk investasi publik. Dalam hal ini, negara berperan sebagai aktor utama dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau. Contoh negara yang cenderung menggunakan pendekatan ini antara lain Afrika Selatan dan Korea Selatan.

Keempat, beberapa akademisi juga memaknai green economy sebagai green revolution. Ekonomi hijau merupakan suatu jalan untuk mengakhiri segala model pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa kalangan menyebutnya sebagai de-growth. Fokus dari kebijakan ini adalah menahan laju eksploitasi alam meskipun fokus kesejahteraan sosial tetap dilakukan. Paradigma ini condong untuk menentang segala bentuk investasi dan berbagai program global terkait ekonomi hijau. Contoh negara yang menggunakan paradigma ini adalah Kosta Rika dan Bolivia.

Berdasarkan dengan empat pendekatan di atas, posisi Indonesia berada di tengah-tengah atau kombinasi antara tiga pemaknaan yaitu *green growth*, *green transformation*, dan *green resilience*. Ketiga pendekatan tersebut dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemerintah yang dilakukan terutama oleh Bappenas. Hal tersebut tercermin dalam dokumen *Low Carbon Development Initiative* dan *A Green Economy for Net Zero Future*.

Kedepannya, Buku Putih Ekonomi Hijau ini merekomendasikan tiga agenda mendesak. *Pertama*, pada aspek kebijakan, perlu adanya upaya untuk menyatupadukan (*realigning*) berbagai kebijakan yang menyangkut ekonomi hijau ke dalam suatu bangunan kebijakan utuh. Indonesia tidak berangkat dari nol tapi bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan secara terfragmentasi. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu membuat *policy* baru tapi cukup konsisten mendukung LCDI (low carbon development initiative). Selain itu, pemerintah juga bisa mengangkat isu green economy ke rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN). Dengan begitu, diharapkan dinamika politik tidak mengubah dan mengganggu agenda green economy.

Kedua, hal yang perlu dilakukan adalah mengubah arsitektur kewenangan di tingkat pusat. Hingga saat ini, kewenangan untuk mengurus agenda green economy ada pada level yang kurang powerful yaitu di posisi Direktorat Jenderal Kementerian/Lembaga. Agar gaung dan kekuatan green economy lebih baik, maka level coordinator harus diangkat ke level yang lebih tinggi misalnya setingkat menteri.

Ketiga, pemerintah juga harus mengkalibrasi kebijakan-kebijakan sektoral terkait lingkungan sehingga tidak terfragmentasi. Dalam hal ini,

diperlukan suatu langkah kebijakan yang mensinkronisasi berbagai kebijakan di semua sektor agar sejalan dan searah dengan agenda green economy.

Keempat, dukungan kebijakan dari masyarakat juga sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah direkomendasikan untuk memfasilitasi keterlibatan warga negara atau citizen engagement terhadap agenda ekonomi hijau dalam bentuk citizen assembly. Dukungan masyarakat di banyak negara membuat citizen assembly sebagai arena deliberative democracy sehingga ada muatan penguatan demokrasinya.

Selanjutnya, berbagai agenda ekonomi hijau ini perlu didukung oleh *supporting system* yang kuat yaitu dalam hal ini parlemen. Jaringan parlemen baik di tingkat lokal, nasional, maupun global sangat diperlukan agar gaung ekonomi hijau mendapatkan dukungan yang kuat dan sejalan dengan berbagai agenda di berbagai level kewenangan.



C. PAPARAN

Selanjutnya sesi paparan dan diskusi dimoderatori oleh Bapak Putu Supadma Rudana, MBA selaku Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Sebelum paparan dimulai, moderator menyampaikan bahwa dengan tingginya perhatian terhadap penanggulangan Covid-19, banyak negara abai terhadap perubahan iklim dan berbagai akibatnya. Namun, DPR RI dan juga Indonesia secara umum ingin tetap komitmen terhadap isu perubahan iklim dengan mengedepankan kearifan lokal. Sebagai contoh, di Bali banyak kearifan lokal yang banyak kita angkat salahsatunya prinsip trihita karena yang secara garis besar mendorong kehidupan manusia dan alam yang harmonis. Beberapa contoh antara lain seperti metode pertanian Subak, Hari Raya Nyepi, dll. Selanjutnya, moderator memperkenalkan pemateri dan kemudian memberikan kesempatan pertama kepada Ketua Komisi VII.



1. Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI)

Pertama-tama, Bapak Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa ekonomi hijau merupakan suatu keniscayaan dan Indonesia sudah mencapai titik *Point of No Return* dalam perubahan iklim. Pada saat yang sama, penggunaan energi baru dan terbarukan juga menjadi solusi konkrit

untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kuat terhadap isu perubahan iklim dengan meratifikasi **Paris Agreement** melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement atas UNFCCC yang didukung oleh Komisi VII DPR RI. Di samping itu, Indonesia juga sudah menyampaikan Komitmen *Net Zero Emission 2060* pada Tahun 2021.

Berbagai inisiatif seperti *Green Growth Plan* dan *Low Carbon Development Initiative* telah dilakukan dengan harapan pengelolaan lingkungan dapat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu pilar dalam peta jalan pencapaian NDC serta Komitmen Net Zero Emission 2060 adalah transisi energi primer seperti fosil menjadi energi ramah lingkungan yakni menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai amanah PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Target bauran EBT pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 23% dan 31% pada tahun 2050. Dari penurunan emisi tersebut, sektor energi berkontribusi dalam menurunkan sebesar 314-398 juta ton CO₂ tahun 2030.

Dalam upaya untuk transisi ekonomi ke ekonomi hijau, Indonesia memiliki sumber energi yang sangat beragam mulai dari energi fosil (batubara, minyak dan gas), panas bumi, uranium serta angin dan panas matahari. Namun demikian, energi fosil saat ini sudah menjadi masalah. Selain dampaknya kepada emisi karbon, Indonesia menghadapi tantangan luar biasa besarnya dari menurunnya *proven reserve* (cadangan terbukti) cadangan minyak dan gas negara kita. impor BBM Indonesia selama 2020 yang dihantam oleh penurunan demand karena Pandemi Covid-19 masih sebesar 97,8 juta barel. Pada saat yang sama, Indonesia yang populasi penduduknya sekitar 260 juta membutuhkan konsumsi BBM 1,4 juta barel per hari padahal kapasitas pengolahan minyak di kilang Pertamina hanya sekitar 1,1 juta barel per hari.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, Komisi VII DPR RI telah mengambil inisiatif dalam penyusunan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). RUU EBT ini merupakan salah satu dari RUU Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2021 yang ditugaskan kepada Komisi VII DPR RI. Komisi VII DPR RI telah sudah menyelesaikan UU Minerba pada tahun 2020 dan diharapkan RUU EBT ini dapat selesai sebelum akhir tahun 2022.

Kemudian, Ketua Komisi VII DPR RI juga menekankan beberapa dampak positif ekonomi hijau. Energi baru dan terbarukan harus terus dipercepat agar menghasilkan banyak manfaat. Pengembangan EBT membuka peluang masuknya investasi khususnya dari internasional berupa Foreign Direct Investment. Menurut Bloomberg New Energy Finance (BNEF), \$13.3 trillion investasi untuk new power generation assets

hingga 2050 secara Global. Hal ini tentu dapat memompa perekonomian sebuah negara.

Menurut International Renewables Outlook 2020 dari International Renewable Energy (IRENA), Energi Bersih dapat meningkatkan keuntungan ekonomi 3 hingga 8 kali lipat, namun manfaat yang dihasilkan bisa mencapai \$50-142 triliun pada tahun 2050, meningkatkan PDB Global sebesar 2,4 persen. Dari sisi pembiayaan dan investasi, Indonesia diperkirakan membutuhkan tambahan 14.087 MW untuk mencapai target 23% pada 2025. Untuk mencapai target ini, Indonesia membutuhkan investasi dan pembiayaan kurang lebih sebesar 34 miliar USD atau 6,8 miliar USD per tahun.

Berbagai pihak, termasuk European Investment Bank yang sempat berdiskusi dengan Komisi VII beberapa waktu lalu, menyampaikan komitmennya untuk menyediakan alokasi setidaknya 200 Juta Euro untuk pembiayaan proyek EBT di Indonesia. Banyak para pelaku industri juga sudah harus mengarah ke penggunaan energi bersih dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan berketahanan iklim. Di level global, ada RE100, sebuah inisiatif energi terbarukan perusahaan global seperti Google, H&M, Zara, Coca-Cola dan ratusan bisnis besar lainnya yang berkomitmen pada penggunaan 100% energi bersih dan terbarukan dalam kegiatan usahanya.

Komisi VII DPR RI juga baru saja kembali dari Swiss beberapa waktu lalu dan bertemu dengan beberapa perusahaan terkemuka seperti Barry Callebaut, perusahaan produser coklat terbesar didunia, yang sedang mengembangkan inovasi pemanfaatan kulit buah cocoa untuk dijadikan Biochar sebagai sumber energi alternatif sekaligus dapat menjadi pupuk tanaman cocoa yang mampu mengikat CO₂.



Paparan dari Ketua Komisi VII
DPR RI Sugeng Suparwoto

2. Ir. Laksmi Dewanti, MA. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK RI)

Pertama, Ir Laksmi menyampaikan selamat dan apresiasi terhadap peluncuran Buku Putih *Green Economy di Indonesia*. Green ekonomi sudah dibahas di KLHK sejak tahun 2008-2009. Dampak pemanasan global sangat dahsyat dan apabila suhu bumi naik hingga 1,5 atau bahkan 2 derajat celsius maka banyak keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai modal pembangunan akan hilang.

Ekonomi hijau merupakan konsep yang sangat luas dan menyangkut kebijakan di banyak sektor tapi dalam acara ini fokus isu perubahan iklim. Indonesia terus berkomitmen dan telah melakukan upaya sejak 1992 dengan mengadopsi pembangunan berkelanjutan dengan berbagai agenda turunannya termasuk perubahan iklim, pelestarian lingkungan dan lain-lain.

Terkait perubahan iklim, Pemerintah RI telah menyusun peta jalan adaptasi perubahan iklim dan peta mitigasi perubahan iklim. Pertemuan perubahan iklim atau COP26 di Glasgow telah menghasilkan *Glasgow Climate Pact* yang salahsatunya ada instrumen untuk memastikan agenda perubahan iklim. Antara lain Article 6 tentang kerjasama internasional tentang *carbon pricing*. Presiden telah menerbitkan Perpres Nilai

Ekonomi Karbon (NEK) untuk mendukung agenda perubahan iklim pada Oktober 2021.

Secara garis besar, KLHK memiliki 3 skenario dalam mencapai target jangka panjang dalam Low Carbon and Climate Resilience (LCCR) tahun 2020 yaitu skenario: Current Policy Scenario (CPS), Transition Scenario (TRANS), dan Low Carbon Scenario compatible with Paris Agreement (LCCP). Indonesia memilih skenario yang ketiga yang salahsatunya berkaitan dengan upaya pengurangan FOLU Net Sink atau Forest and Land Underuse tahun 2030. Artinya di sektor kehutanan serapan emisi akan sama atau lebih besar dari emisi yang dihasilkan. Dan agenda kedua adalah energi transisi.

Ada dua tujuan utama yaitu mitigasi berupa penurunan 41% GHG emission reduction dengan bantuan internasional atau 29% tanpa bantuan internasional. Dan yang kedua adalah agenda untuk peningkatan ketahanan iklim dengan prioritas pada sektor kehutanan dan sektor limbah.

Pada sektor kehutanan ada target namanya FOLU Net Sink 2030 yaitu berupa target serapan emisi lebih besar atau sama dengan emisi yang dikeluarkan pada tahun 2030. Untuk mencapai itu, KLHK telah menyusun 6 agenda berupa pengurangan deforestasi, manajemen lahan gambut, rehabilitasi hutan, dll. Ini tentu bukan saja agenda KLHK tapi juga agenda banyak pihak lintas kementerian termasuk pemerintah daerah.

Sedangkan di sektor limbah, Pemerintah RI melalui KLHK mendorong pengembangan ekonomi sirkular. Di Indonesia, ekonomi sirkular telah diamanahkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Persampahan. Agenda ekonomi sirkular fokus pada dua hal yaitu pengurangan limbah dan jika masih ada limbah maka akan diolah untuk bisa kembali menghasilkan produk yang bernilai guna. Hingga saat ini, sirkular ekonomi sudah diimplementasikan di berbagai daerah termasuk pembangkit listrik tenaga sampah, pengadaan bak sampah, dll.

Namun demikian, agenda ekonomi hijau masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa tantangan terdekat antara lain bagaimana meningkatkan pemahaman publik termasuk pemerintah di berbagai lapisan terhadap konsep ekonomi hijau, ekonomi sirkular dan berbagai agenda lain.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tentunya Pemerintah RI melalui KLHK telah memiliki modalitas seperti NDC Mitigation Roadmap, NDC Adaptation Roadmap, program kampung iklim (ProKlim), dan berbagai tools lainnya. Sedangkan terkait *carbon pricing* seperti Perpres NEK Nomor 98 Tahun 2021 sebagai instrumen untuk mengontrol dan

memanage *carbon trading*, result-based payment, carbon taxation sebagai mekanisme insentif dan disinsentif.

3. Amalia Adininggar Widayasanti (Deputi Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas)

Deputi Ekonomi Bappenas mengawali paparannya dengan menegaskan bahwa Visi Indonesia 2045 adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam RPJMN 2020-2024, agenda pembangunan rendah karbon telah dimasukkan sehingga seluruh sektor pembangunan harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon. Ekonomi harus tetap berlangsung tapi tidak merusak lingkungan.

Salahsatu arahan Presiden dalam pembangunan lima tahunan adalah transformasi ekonomi dan salahsatu dari 7 agenda pembangunan adalah ketahanan iklim dan bencana. Sebagai upaya untuk itu, maka pembangunan rendah karbon menjadi salahsatu yang paling penting. Dalam visi pembangunan jangka panjang, maka target terdekat Pemerintah RI adalah First NDC tahun 2030, kemudian visi Indonesia 2045 serta net zero carbon pada tahun 2060. Dalam kaitannya dengan misi menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah berpandangan bahwa ekonomi hijau tidak akan memperlambat pertumbuhan tapi justru menjadi arena baru sebagai modal pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi hijau memiliki market yang sangat besar. Berdasarkan studi yang ada terindikasi bahwa 75% investor tertarik pada ekonomi hijau atau dengan prinsip ESG (*Environmental, Social, dan Governance*). Produksi di tingkat dunia telah mengarah pada *sustainable product*. Oleh karena itu, Pemerintah RI beranggapan bahwa jika Indonesia tidak ikut arus global ini maka akan kehilangan *opportunity cost* dari pasar ekonomi hijau.

Ekonomi hijau akan memberikan dampak positif yang sangat besar mulai dari sisi penciptaan lapangan kerja, efektivitas dan efisiensi ekonomi, transfer teknologi, dan menarik investasi yang luar biasa besar. Ekonomi hijau akan menjadi game changer dalam pembangunan Indonesia ke depan. Bappenas telah menyusun 6 agenda besar dalam rangka transformasi ekonomi yaitu: 1) competitive human resource, 2) economic sector productivity, 3) green economy, 4) digital transformation, 5) domestic economic integration, dan 6) capital city relocation. Ekonomi hijau fokus pada tiga isu yaitu low carbon economy, blue economy, dan transisi energi.

Secara lebih detil, strategi yang diusung Bappenas antara lain ekonomi hijau, clean transportation, sustainable farming dan food security, sustainable forest, sustainable water resources, sustainable coastal and marine, serta ekonomi sirkular.

4. Rafael Jimenez Abyar (*Westminster Foundation for Democracy*)

Pertama-tama Mr. Rafael Jimenez mengapresiasi kepemimpinan dan inisiatif BKSAP dalam penyusunan White Paper Green Economy yang diharapkan mampu menjadi inspirasi konkret transisi ekonomi. Posisi Indonesia sangat strategis dalam perbincangan dan agenda ekonomi hijau global.

Dalam kesempatan itu Mr. Jimenez menyoroti dua hal berkaitan dengan transisi Indonesia menuju *green economy*. Covid-19 merupakan hal utama yang menjadi katalisator investasi di berbagai negara. Pada konteks ini, *green investment* atau investasi di ranah ekonomi hijau akan sangat krusial bagi pembangunan ekonomi suatu negara di masa yang akan datang meskipun banyak negara berkembang belum konsen terhadap investasi hijau.

Di negara-negara maju investasi hijau telah tersebar ke berbagai sektor pembangunan sedangkan di negara-negara berkembang investasi hijau masih terbatas pada sektor-sektor tertentu sehingga kesempatan untuk memanfaatkan ekonomi hijau masih rendah. Selain itu, negara-negara berkembang juga masih berhadapan dengan hambatan teknologi, kapasitas tenaga kerja dll.

Green economy merupakan agenda global yang makin penting termasuk dekarbonisasi. Pada saat yang sama, peningkatan energi terbarukan juga krusial untuk pencapaian SDGs terutama untuk beberapa tujuan. Terdapat beberapa negara yang bisa menjadi contoh bagaimana investasi ekonomi hijau. Sebagai contoh, Korea Selatan mendapatkan investasi yang impresif dan fokus pada energi dan industri hijau dan pembangunan bio dan surya. Contoh lain adalah di Pakistan yang juga menunjukkan progres menjanjikan.

Dalam hal ini, modal alam memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka panjang, investasi di ekonomi hijau dapat mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Pada saat yang sama, investasi di bidang ekonomi hijau juga sangat menguntungkan bagi pemeliharaan biodiversitas. Tentunya ekonomi hijau juga tidak hanya akan menguntungkan dari sisi ekonomi dan lingkungan, tapi juga positif bagi aspek kesehatan mental. Sebagai contoh, adanya ruang hijau dapat meningkatkan kesehatan mental manusia.



D. DISKUSI

Setelah keempat pembicara memaparkan materinya, selanjutnya adalah sesi diskusi. Namun, karena waktu yang tersisa sangat singkat maka sesi diskusi dibatasi hanya sekitar 10 menit. Karena itu, Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon langsung mengambil forum untuk menyampaikan pernyataan penutup.

1. Dr. Fadli Zon

Dr. Fadli Zon menegaskan di akhir acara terkait agenda ekonomi hijau di Indonesia sangat tepat untuk mengikuti koridor yang ada di dalam dokumen White Paper. Agenda menuju ekonomi hijau mencakup tiga koridor utama yaitu *policy initiative*, *citizen assembly*, *international cooperation*. Di luar semua rekomendasi kebijakan di atas, agenda ekonomi hijau ini membutuhkan keterlibatan masyarakat (*citizen engagement*) dan juga konsen terhadap penguatan *literacy* warganegara terkait ekonomi hijau. Di sisi lain, Indonesia juga perlu meningkatkan upaya-upaya implementasi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam beberapa forum global, seperti COP26, Indonesia selalu mendapatkan peranyaan terkati deforestasi.

2. Johan Budi

Program-program ekonomi hijau dan lingkungan serta energi baru sudah lama digaungkan di Indonesia, namun hingga saat ini tidak ada kesinambungan dan hasilnya minim. Agenda green economy bilangannya bukan lagi 5-10 tahun tapi 30-40 tahun. Karena itu, kita harus menyusun kebijakan yang sangat komprehensif dan hati-hati. Kita sepakat bahwa agenda ekonomi hijau harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang yaitu RPJPN. Selain itu, DPR RI juga sepakat bahwa gaung ekonomi hijau harus dinaikan lagi agar semua konsen terhadap agenda itu.

III. KESIMPULAN

- Pandemi Covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk mengubah pola konsumsi dan produksi yang sejalan dengan agenda ekonomi hijau. *Green economy* merupakan paradigma pengelolaan ekonomi yang lebih *sustainable*. Sebagian besar negara di dunia sudah mulai beralih ke ekonomi hijau sehingga peralihan ke ekonomi hijau bukan lagi pilihan tapi kebutuhan, *no point to return*.
- Ekonomi hijau tidak akan menjadi penghambat agenda pertumbuhan ekonomi tapi justru berpotensi akan menjadi katalisator baru.
- Agenda ekonomi hijau membutuhkan upaya sistematis di berbagai aspek. Agenda ini membutuhkan kolaborasi multi-sektor, multi-pihak, dan *inter-country partnership*. Di samping itu, agenda ekonomi hijau juga tidak hanya berkutat pada aspek kebijakan tapi juga membutuhkan dukungan dan penataan pada aspek *governance* terkait penataan kewenangan, pengaturan kelembagaan, serta penyediaan anggaran.
- Penanganan perubahan iklim tidak hanya menyangkut sektor lingkungan hidup tapi juga sektor-sektor lain terutama energi, lahan, transportasi, penanganan sampah, pertanian, serta industri, dan juga pendidikan. Oleh karena itu, kita butuh transformasi di semua lini yang sejalan dengan semangat ekonomi hijau.
- Aspek pendanaan, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur yang menopang transformasi ekonomi hijau sangat diperlukan sehingga sinergi dengan sektor swasta, pelaku bisnis, dan tentunya pemerintah daerah sangat krusial.
- Agenda ekonomi hijau juga membutuhkan pelibatan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Terdapat banyak instrumen dan modal sosial di Indonesia yang bisa dikembangkan untuk menjadikan ekonomi hijau menjadi *socially-grounded*. Keberadaan *citizen assembly*

akan menjadi ruang bagi pelaksanaan demokrasi deliberatif warga negara terhadap berbagai agenda ekonomi hijau.

- Peran parlemen yaitu DPR RI sangat vital dalam agenda ekonomi hijau. DPR RI bisa berperan sebagai *boundary-spanner* antar parlemen lintas negara dan antara pemerintah dan masyarakat. Tentunya selain melaksanakan fungsi-fungsi tradisional seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Selanjutnya, DPR RI juga harus menjadi yang terdepan dalam upaya penguatan literasi perubahan iklim dan ekonomi hijau di tingkat akar rumput.



IV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Launching Buku Putih Ekonomi Hijau ini disampaikan. Semoga dokumen laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih.

Jakarta, 17 Januari 2022
Ketua BKSAP DPR RI

Dr. Fadli Zon
A-86